

Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Kampar

Julianto Akbar^{1*}, Muhammad Syaifuddin², Tuti Andriani³

¹ BAZNAS Kabupaten Pelelawan, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-12-2019

Disetujui: 22-12-2019

Kata kunci:

Manajemen Pembiayaan,
Manajemen Pendidikan Islam,
Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana
(SKSS), BAZNAS

ABSTRAK

Abstract: This study aims to see and analyze whether there is an influence, (1) Competence, (2) Experience, (3) and the Competence and Experience of teachers together on the Implementation of Human Resource Management in Private Madrasah Tsanawiyah in Pekanbaru City. The population in this study were all teachers of MTs Al-Muttaqin Pekanbaru, MTs Fadhillah Pekanbaru and MTs Ummatan Washatan Teknologi Riau, totaling 61 people. In taking the sample, the researcher uses a probability sampling technique, which is a technique that provides equal opportunities for each member of the population to be selected as a sample. Data was collected using a questionnaire technique, the data collected was analyzed using multiple linear regression analysis, namely $Y=a+b1X1+b2X2$. The results of this study show R Square of 0.407 or 40.7%. This value can be interpreted that changes in the implementation of human resource management by changes in the competence variable are 40.7%. (X1) The results of this study show R Square of 0.666 or 66.6%. This value can be interpreted that changes in the implementation of human resource management by changes in the experience variable are 66.6%. The multiple regression test is $Y=a+b1X1+b2X2$. The results of this study indicate the value of R² (coefficient of determination) or R Square of 0.418 or 41.8 0%. This value can be interpreted that changes in the implementation of human resource management by changes in the value of the independent variables of competence and experience are 41.8% while 58.2% is determined by changes in other factors.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa apakah ada pengaruh, (1) Kompetensi, (2) Pengalaman, (3) dan Kompetensi dan Pengalaman guru secara bersama-sama Terhadap Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Madrasah Tsanawiyah Swasta se-Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Guru MTs Al-Muttaqin Pekanbaru, MTs Fadhillah Pekanbaru dan MTs Ummatan Washatan Teknologi Riau yang berjumlah 61 orang. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode pengambilan teknik probability sampling yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi liner berganda yaitu $Y=a+b1X1+b2X2$. Hasil penelitian ini menunjukkan R Square sebesar 0,407 atau 40,7%. Nilai ini dapat diartikan bahwa perubahan implementasi manajemen sumber daya manusia oleh perubahan variabel kompetensi sebesar 40,7%. (X1) Hasil penelitian ini menunjukkan R Square sebesar 0,666 atau 66,6%. Nilai ini dapat diartikan bahwa perubahan implementasi manajemen sumber daya manusia oleh perubahan variabel pengalaman sebesar 66,6 %. Untuk uji regresi berganda yaitu $Y=a+b1X1+b2X2$. Hasil Penelitian ini menunjukkan nilai R² (koefisien determinasi) atau R Square sebesar 0,418 atau 41,8 0%. Nilai ini dapat diartikan bahwa perubahan implementasi manajemen sumber daya manusia oleh perubahan nilai variabel bebas kompetensi dan pengalaman 41,8% sedangkan 58,2% ditentukan oleh perubahan faktor lainnya.

Alamat Korespondensi:

Julianto Akbar
BAZNAS Kabupaten Pelelawan
E-mail: julianto.akbar@gmail.com

LATAR BELAKANG

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bekerjasama dengan Institute Pertanian Bogor (IPB) atas dasar Produk Domestik Bruto (PDB) potensi zakat di Indonesia pada tahun 2017 ternyata besar sekali, yakni sebesar Rp 217 triliun, namun yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau 6 triliun per tahun berarti masih ada sekitar 98% potensi zakat yang belum terkumpul (Sudibyo, 2018). Sebagai bagian dari potensi keuangan islam zakat bermanfaat sebagai sarana pengetasan kemiskinan dan mengoptimalkannya sebagai instrument kebangkitan ekonomi. Hal ini disebabkan karena esensi zakat bertujuan untuk membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pada proses penyaluran zakat tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme yang berbeda yaitu secara karitas maupun produktif.

Pertama, ketika zakat disalurkan secara karitas (penyaluran dana langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok atau penyediaan layanan kepentingan umum), dalam jangka pendek bagi *mustahik* hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk melanjutkan hidup. Penyaluran zakat dalam bentuk karitas biasanya berbentuk bantuan yang konsumtif seperti papan, sandang dan pangan. Sebaliknya, ketika zakat disalurkan dengan cara produktif maka akan terjadi proses pemberdayaan dalam jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik*. Pada akhirnya, kedua mekanisme penyaluran zakat tersebut akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019). Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, potensi zakat dipandang perlu dioptimalkan lagi, zakat merupakan solusi sumber pendanaan selain Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) zakat nantinya akan menjadi sebagai suatu kekuatan ekonomi umat sekaligus meningkatkan perekonomian negara.

Dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara melalui sebuah lembaga atau departemen khusus yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) dengan mengacuh pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Zakat yang pengelolannya dilakukan oleh Negara, bukan berarti dana zakat digunakan untuk keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya lainnya. Zakat dikelola oleh negara dalam artian dihimpun dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai *fasilitator*, untuk memudahkan sistem dalam pengelolaan zakat tersebut. Pemerintah tealah membuat regulasi yang jelas terkait pengelolaan zakat yakni melalui UU NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah non struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat sesuai dengan syariat islam. Sebagai lembaga resmi pemerintah BAZNAS berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu membantu Negara memberantas kemiskinan (Asnaini, 2008: 4). Untuk tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, BAZNAS memiliki keterwakilan di masing-masing regional wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Kampar terdapat BAZNAS Kabupaten Kampar yang dulunya bernama BAZDA Kabupaten Kampar yang lahir sebagai implementasi surat keputusan Nomor KPTS/400/SOS/2000/221 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dan instruksi Bupati Kampar Nomor 450/SOS/2000/183 tanggal 22 Februari 2001.

Setelah dikeluarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) memiliki kantor yang bertempat di jalan D.I Panjaitan Bangkinang. Pada tanggal 14 februari 2014, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jika selama ini Badan Amil Zakat diberbagai daerah digerakkan dari unsur pemerintah (pegawai negeri), maka kedepannya dalam organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah pengurusnya lebih dominan adalah unsur masyarakat (Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, 2001).

Sementara itu berdasarkan data monitoring Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau pada tahun 2020, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar berada di posisi ke empat setelah BAZNAS kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir dengan total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar sebesar Rp. 11,2 miliar dan total penyaluran sebesar Rp. 10,8 miliar. Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2018 berjumlah 839.886 jiwa, dengan luas wilayah 10.983,47 km² (Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, 2001). Potensi zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat Kabupaten Kampar sebesar Rp 20 milyar. Meskipun realisasi jumlah penghimpunan dengan potensi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar telah cukup baik, diharapkan pada tahun selanjutnya total penghimpunan dana zakat di Kabupaten Kampar dapat meningkat agar dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para *mustahiq* di Kabupaten Kampar (Rasyid, 2021).

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kab. Kampar

Tahun	Zakat Melalui	Zakat	Jumlah
	UPZ Dinas	Pribadi	Penghimpunan Zakat
2018	8.027.849.768	155.704.683	8.183.554.451
2019	9.999.050.906	201.461.000	10.200.511.906
2020	10.565.676.752	188.281.000	10.753.957.752

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sebagai lembaga pengelola zakat melakukan penghimpunan zakat di wilayah Kabupaten Kampar, dapat dilihat dari jumlah penghimpunan zakat yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Penghimpunan terbesar di terima dari pembayaran zakat melalui UPZ dinas yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peran pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan Instruksi ASN untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006.

Tabel 2. Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar

Tahun	Jumlah Dana Terdistribusi
2018	Rp 9.862.475.752
2019	Rp 10.395.002.701
2020	Rp 10.867.811.285

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Harapannya semakin banyak dana zakat yang terkumpul semakin banyak *mustahiq* yang dientaskan dari kemiskinan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Riau, Praktis hanya Kepulauan Meranti dengan nilai 78% dan Kota Dumai 78.20% yang mampu melampaui target APM (Angka Partisipasi Murni) Pada jenjang SLTP dan SLTA, hal ini menunjukkan masih banyak anak-anak belum mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia mereka. Makin rendah persentase nilai dari nilai pendidikan yang mereka dapatkan berarti makin sedikit anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tersebut.

Kondisi ini jika tidak segera diatasi, maka akan terjadi kesenjangan sosial serta ekonomi antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. akibat kesenjangan tersebut maka akan timbul berbagai masalah sosial dan ekonomi atau bahkan kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan program pemerintah untuk menangani pendidikan melalui peningkatan kesadaran pemerintah maupun perbaikan, penambahan fasilitas serta akses untuk memperoleh pendidikan ataupun program lainnya (BPS Provinsi Riau tahun, 2019). Salah satu yang menjadi permasalahan dalam permasalahan kemiskinan adalah pendidikan. Karena ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan, mayoritas lebih memilih tidak meneruskan pendidikannya dan mencari pekerjaan. Saat ini, lazim terjadi persepsi ditengah-tengah masyarakat bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat kesuksesan ekonomi seseorang hal ini bukanlah tanpa alasan yang mendasar. Hal ini sudah menjadi menjadi tren sosial, pada masa awal masa pemerintahan orde baru, dalam penyerapan tenaga kerja dibutuhkan tenaga kerja yang sudah menyelesaikan pendidikan formal. Ini sudah menjadi bagian yang terpisahkan dan menjadi syarat mutlak dalam penyerapan lahan pekerjaan. Fenomena ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai guna mengoperasikan *skill* dan keahliannya dalam rangka mendukung industrilisasi dan modernisasi pembangunan negara (Rivai dkk, 2014). Sebagai Negara yang berkembang, kemiskinan menjadi suatu tantangan bagi Indonesia untuk dicari solusi dari pengetasannya, berbagai kebijakan instrumen kebijakan telah dilakukan guna menekan angka kemiskinan. Baik kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum dapat dalam menurunkan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 14% atau ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia yang berada di garis kemiskinan (Pratama, 2015).

Pemerintah melalui UUD 1945 telah mengakomodir anggaran untuk pendidikan dengan persentase 20 persen dari total belanja negara, yang sumber keuangannya berasal dari anggaran pembelanjaan Negara, sebagaimana diketahui hal ini belum berdampak dan terjadi peningkatan yang betul-betul signifikan dalam anggaran pendidikan. Realitas ini tidak dapat dibiarkan saja karena akan berdampak negatif kepada generasi berikutnya salah satunya rendahnya kualitas intelektual sehingga di khawatirkan akan menjamurnya kasus pekerja dibawah umur, anak jalanan, *prostitusi* anak dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup (Tho'in, 2017). Zakat adalah salah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Swt yang diserahkan kepada mustahik. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'an dan hadits. Sebagian zakat yang disalurkan dari pendapatan *muzakki* kepada mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga kebutuhan dasar itu akan mempengaruhi sektor-sektor produksi dan konsumsi masyarakat terhadap permintaan barang dan jasa. Hal inilah yang akan meningkatkan efisiensi alokasi dalam perekonomian. Jika ibadah zakat, infaq dan sedekah dan wakaf (ZISWAF) dijalankan maka pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan, anak yang harus putus sekolah karena tidak adanya biaya, anak yatim terlantar, perumahan kumuh dan seterusnya akan dapat terpenuhi dari dana zakat. Dalam pendekatan birokratik dan juga politik misalnya, telah muncul Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Atas dasar Undang-Undang itu, telah banyak instruksi dan bahkan juga contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadikan zakat ini sebagai gerakan sosial (Hafidhuddin dkk, 2008).

Tradisi ZISWAF ini bagian dari kegiatan filantropi Islam di Indonesia yang telah mengakar beriringan dengan masuknya Islam di Indonesia, walaupun pelaksanaannya masih sederhana, yaitu penderma langsung memberikan derma (zakat, infak, sedekah) kepada penerima (mustahik). lembaga filantropi yang dikenal adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Abdurrazaq, 2014). Masyarakat muslim Indonesia memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang potensial dan berkesinambungan melalui ZISWAF (Zulfa, 2016). ZISWAF dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dengan cara penggolongan yang berhak menerima ZISWAF. Jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka peserta didik yang tergolong dalam fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, bisa menjadi sasaran penerima program pendidikan (Machali & Futaqi, 2018). Kegiatan filantropi dapat diintegrasikan

dengan konsep ZISWAF, yaitu menggunakan konsep masalah ‘ammah atau kebaikan (kesejahteraan) bersama (kolektif). Di Indonesia sendiri banyak gerakan filantropi yang terinisiasi dalam beberapa lembaga zakat dibawah naungan BAZNAS seperti Dompot Duafa (DD) di Jakarta, Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ) atau Rumah Zakat Indonesia (RZI) di Bandung, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya (Latief, 2013).

Menurut Sallis, berbagai instansi ataupun lembaga mulai melakukan pemberian jasa di bidang pendidikan. Jasa-jasa ini meliputi pemberian beasiswa, penilaian dan bimbingan bagi para pelajar, para orang tua, dan para sponsor mereka. Para pelanggan terdiri dari bermacam-macam golongan dan perlu dilakukan identifikasi. Dimana tujuan manajemen mutu pendidikan ialah memenuhi kebutuhan pelanggan. Keragaman pelanggan tersebut membuat suatu institusi ataupun lembaga pemberi jasa beasiswa dapat memprioritaskan perhatian mereka pada kebutuhan dan meningkatkan prosedur yang ada untuk menjawab kebutuhan mereka, ada satu hal yang harus di garis bawahi bahwa kesuksesan lembaga pemberi jasa beasiswa tidak terlepas dari pelajar yang mereka beri beasiswa (Sallis, 2012).

Terdapat empat ciri dalam setiap jasa yang kita temui, yaitu: (a) Tidak berwujud, dimana konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasil suatu produk sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, maka konsumen dituntut untuk dapat mencari informasi terkait jasa yang ditawarkan; (b) Tidak terpisahkan (*inseparability*), di mana jasa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan yang menawarkannya; (c) Bervariasi (*variability*) di mana jasa sifatnya tidak tetap bahkan acapkali berubah-ubah tergantung siapa, kapan dan di mana menawarkannya; (d) Mudah musnah (*perishability*), kedepannya jasa bukan menjadi suatu hal yang bernilai masa yang akan datang (Rivai dkk, 2014). BAZNAS sebagai lembaga Negara yang ditunjuk pemerintah berdasarkan regulasi yang ada, sudah banyak membantu masyarakat yang berasal dari ekonomi rendah untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka (Fadilah dkk., 2016) salah satunya ialah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Beastudi Mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya. Target Program 1. Lulusan SMA/MU/SMK/Ponpes yang lulus USMPTN dan terdaftar di PTN regional SKSS. 2. Memiliki kepedulian sosial 3. Memiliki keinginan untuk pemberdayaan potensi lokal daerah 4. Siswa dengan nilai tambah non-akademis yang dilengkapi dengan surat keterangan atau sertifikat Pembiayaan seorang peserta Beastudi Unggulan SKSS BAZNAS meliputi: 1. Biaya hidup (*living cost*) yang biayanya dialokasikan selama menjalani masa studi mahasiswa akan mendapat tunjangan biaya hidup yang besarnya ditentukan oleh BAZNAS. Untuk tahun angkatan 2008-2009 sebesar Rp. 200.000,-, 2. Biaya Pendidikan (*tuition fee*) merupakan hasil kerjasama antara BAZNAS dengan PTN dan besarnya sesuai dengan biaya pendidikan di PTN dimana peserta teregistrasi. 3. Mahasiswa yang bersangkutan juga mendapatkan bantuan biaya pembinaan sebagai sarana pengembangan diri yang di berikan melalui pihak ketiga / mitra BAZNAS (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Melalui regulasi yang ada yaitu peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 BAZNAS Kampar melakukan tugasnya sebagai lembaga pengelola Zakat Infaq dan Sedekah dibidang pendistribusian melalui program Kampar Cerdas dalam rangka bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Kampar, salah satunya melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang nantinya pada proses akhirnya dilakukan penandatanganan akad persetujuan antara orang tua penerima manfaat dan pihak BAZNAS Kampar terkait hak dan kewajiban yang diterima sebagai mahasiswa penerima manfaat program ini, Adapun BAZNAS Kampar mulai melaksanakan program beasiswa ini ditahun 2018 (Rasyid, 2021). Tahun 2018 BAZNAS Kampar mulai melaksanakan program Beasiswa tersebut. hingga tahun 2020 saat ini sebanyak kurang lebih 36 mahasiswa putra-putri daerah Kampar menerima manfaat dari program ini, dimana penerima manfaat program ini melalui seleksi yang ketat yang dilakukan oleh BAZNAS Kampar baik mereka melalui tahapan seleksi berkas, wawancara hingga melalui proses verifikasi faktual oleh tim seleksi BAZNAS Kampar untuk melihat keabsahan data kondisi calon penerima beasiswa BAZNAS Kampar.

Adapun di setiap tahunnya BAZNAS Kampar telah mengalokasikan pembiayaan pendidikan program SKSS melalui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kampar dengan penerima manfaat sebanyak 36 orang disetiap tahunnya. mahasiswa penerima manfaat program ini tersebar di beberapa kampus negeri dan swasta yang ada di Indonesia untuk kampus swasta dilakukan syarat tambahan yakni minimal terakreditasi “B” sedangkan kampus negeri tidak dibatasi wilayah pendidikannya. Syarat untuk penerima manfaat merupakan warga Kabupaten Kampar dibuktikan dengan Dokumen kependudukan resmi di wilayah Kampar serta berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nantinya, Mahasiswa yang lulus seleksi program SKSS memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan keuangan SKSS serta melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) usaha *Zakat Community Development* (ZCD) Ternak Sapi yang tersebar di beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Di dalam dunia pendidikan, manajemen menempati urutan utama dalam konteks program pendidikan. Jika program sudah dicanangkan, maka manajemen akan bertindak sebagai eksekutor yang sangat menentukan berhasil tidaknya program tersebut. Salah satu tujuan dari manajemen mutu pendidikan ialah menjadikan institusi pemberi beasiswa menjadi sebuah tim yang kuat dan profesional untuk meraih suatu tujuan tunggal, yaitu memuaskan pelanggan (pelajar) (Sallis, 2012).

Menurut Fatah, biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan perabot/meubeler, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis gambar, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi/ pembinaan pendidikan, serta ketatausahaan sekolah (Nanang, 2012). Pembiayaan

pendidikan apabila dikontekskan pada penyelenggaraan program pendidikan melalui dana zakat, maka informasi tentang manajemen biaya ini dapat dikaitkan dengan informasi tentang sumber biaya, baik dari donatur, orang tua penerima manfaat, masyarakat, serta potensi lain yang menopang biaya penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain juga dapat memberi informasi tentang sistem layanan proses pendidikan yang dikaitkan dengan biaya yang layak untuk suatu layanan yang sifatnya lebih baik serta upaya mendukung keputusan dengan program yang harus dilakukan secara baik dan benar sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban BAZNAS.

Tujuan pendidikan pada hakikatnya ialah mengusahakan suatu lingkungan dimana setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mewujudkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhannya. Alasan yang sering diutarakan mengapa siswa-siswi berprestasi perlu mendapatkan perhatian atau program pendidikan adalah karena mereka sudah dianugrahi bakat-bakat yang sangat luar biasa, tanpa perhatian khusus mereka tidak akan mewujudkan bakat dalam dirinya dan mencapai keunggulannya. Melihat permasalahan yang telah disebutkan, program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS), dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi problem di atas. Sesuai dengan namanya program beasiswa ini di tujukan kepada siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu tetapi masih mempunyai keinginan yang kuat dan juga memiliki prestasi akademik maupun non akademik untuk melanjutkan pendidikan dengan tujuan agar siswa-siswi tersebut bisa melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar sarjana dengan nilai yang baik sehingga setelah lulus dapat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kampar untuk mengungkapkan bentuk Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Kampar dengan mengangkat penelitian tesis yang berjudul "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Kampar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka (Moleong, 2009). Adapun data yang bersifat angka hanya dijadikan sebagai data pelengkap penelitian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang terletak di di Jalan D.I Panjaitan Gedung Muammalah Kompleks Markaz Islamy Kabupaten Kampar, Telp. (0762) 21238 Email: baznaskab.kampar@baznas.go.id dan laman Website yang dapat disearching di <http://baznaskamparkab.go.id>. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar merupakan lembaga pengelola zakat bersifat non struktural yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Kabupaten Kampar untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Adapun yang menjadi informan kunci pada penelitian ini adalah Ketua Baznas Kampar, Kepala Bagian (Kabag) Pendistribusian, Pendayagunaan dan pengumpulan. Adapun yang menjadi informan tambahan pada penelitian ini adalah Ketua kelas Program, Mahasiswa penerima manfaat, Orangtua penerima manfaat dan tokoh masyarakat.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utama secara langsung dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan melalui wawancara langsung. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah di dokumentasikan oleh BAZNAS Kampar maupun lembaga Program SKSS baik berupa Flyer pengumuman dari tahap penerimaan hingga kelulusan SKSS, dan juga data penting lainnya seperti: laporan jumlah pendaftar, laporan kelulusan siswa yang mengikuti seleksi dan proses didalamnya, laporan perkembangan mahasiswi-mahasiswi baik dari nilai studi maupun hafalan hadist dan Al-Qur'an, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini diantaranya dokumen-dokumen pemberian informan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: laporan kegiatan program SKSS atau laporan hasil perkembangan mahasiswa penerima manfaat program ini.

Untuk melengkapi data yang diperlukan, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai terdiri dari: Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Pelaksana (Amil) Bagian keuangan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Ketua Kelas Program dan Penerima Manfaat Program/Mustahiq. Observasi yang peneliti lakukan adalah terkait dengan Manajemen Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Pada Badan Amil Nasional Kabupaten Kampar. Hasil penelitian wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa foto yang telah ada. Untuk mengetahui keandalan dan keakuratan data akan dipergunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, dalam hal ini digunakan *triangulasi* sumber dan *triangulasi* metode.

Untuk menganalisa data, Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi

data berarti juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan atau Planning Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar

Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Kampar telah menyusun kewajiban jangka panjang (*long term liability*) terhadap pelaksanaan program beasiswa demi tercapainya kelulusan generasi pertama tahun 2018 berbagai jenis bantuan sudah diakumulasikan hingga uang wisuda juga diperbantukan bila dana memungkinkan. BAZNAS Kabupaten Kampar telah memperkirakan besarnya pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan beasiswa di BAZNAS. Penyusunan anggaran pada program beasiswa bertujuan untuk memberikan kewenangan pengeluaran dana sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya, selain itu penyusunan anggaran jangka panjang juga berfungsi sebagai alat efisiensi yaitu sebagai perbandingan tahapan perencanaan dan realisasi dari anggaran yang tersedia, sehinggadapat dilihat atau tidak adanya penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya.

Dalam proses perencanaannya jumlah dana zakat untuk pendidikan program Kampar cerdas yang didistribusikan oleh BAZNAS kabupaten Kampar. dilakukan dengan penyesuaian jumlah dana zakat yang terkumpul dengan permohonan *mustahik* yang masuk. Jadi, jumlah dana zakat tidak dipersentasekan diawal, melainkan disesuaikan, didalam pelaksanaannya penyusunan anggaran pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana berdasarkan rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) Baznas. Dalam Pendistribusian dana zakat, BAZNAS kabupaten Kampar telah membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kemudian menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. SOP distribusi dana zakat pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana juga telah dirumuskan. Dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi tentang perencanaan pembiayaan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana cenderung memilih metode analisis siklus kehidupan, yang hanya menekankan pada pengalokasian sumber pembiayaan, dan mempertimbangkan aspek rencana dan program saja, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa metode siklus kehidupan melihat berbagai kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana program (Nanang, 2013\). Di dalam tim pelaksana program satu keluarga sarjana, ada sisi kekurangan yakni tidak dicantumkan penegasan bahwa perencanaan akan dilaksanakan di masa mendatang, sebab sebegus apapun sebuah perencanaan belum dapat direalisasikan, dan belum dapat memotret keberhasilan sebuah program, oleh sebab itu Ali Mufron menegaskan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang di arahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal (Ali, 2013).

Dari hasil wawancara dapat dimengerti bahwa teori yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana adalah teori radikal, artinya lembaga berhak dan bebas menyusun rencana anggaran pendidikan secara fleksibel, adil, bertanggungjawab, dinamis, praktis, dan dapat menambah keikhlasan bagi penyusunnya, sebab semua gagasan yang dirancang dapat terakomodir, sesuai kebutuhannya guna mewujudkan visi lembaga, tanpa intervensi pihak lain, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam seperti yang dikemukakan Ali Mufron (Ali, 2013). Senada dengan Ali Mufron, Husaini Usman, menjelaskan bahwa teori Radikal menekankan kebebasan lembaga untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar lebih cepat memenuhi kebutuhan lokal (Usman, 2013). Teori ini mengandung kelemahan, yaitu kebebasan menyusun anggaran pembiayaan akan membuka peluang kebocoran anggaran. Dari hasil wawancara juga dijelaskan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan pada program satu keluarga satu sarjana tergantung dari jumlah dana zakat yang terhimpun, hal ini dimaksudkan agar pengeluaran sesuai rencana, dan kegiatan dapat terealisasikan dengan uang dan anggaran yang tidak jauh dari yang direncanakan, sumber dana pembiayaan berasal dari dana zakat, Hal ini mengandung pengertian bahwa pengeluaran dalam membelanjakan anggaran pembiayaan pendidikan dilakukan dengan hati-hati sesuai syariat dan ketentuan perundang-undangan serta sesuai rencana/*planning* yang telah ditetapkan antara komisioner BAZNAS dan amil pelaksana program agar tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dapat diwujudkan dengan segala daya dan upaya dengan sarana yang ada, yang berarti setiap program yang dilaksanakan seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal (Ali, 2013).

Dari data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui metode analisis siklus kehidupan, mengingat sebelum melakukan kegiatan pendistribusian terlebih dahulu melihat jumlah dana zakat yang terhimpun sesuai dengan RKAT BAZNAS. Dengan menetapkan skala prioritas dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan mahasiswa sebagai penerima manfaat, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan.

Pengorganisasian atau *organizing* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi serta observasi dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kampar telah membuat *strukturisasi* dalam pengorganisasian yang tersusun rapi sesuai dengan kemampuan sumber daya di lembaga tersebut hal ini dilakukan untuk keefektifitasan pencapaian tujuan program, itu sendiri. BAZNAS Kabupaten Kampar melibatkan Amil dari berbagai bidang untuk terlibat dalam program beasiswa satu keluarga satu sarjana. Pengorganisasian yang matang ini dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan asas berkeadilan. Berdasarkan hasil observasi, pada proses pengorganisasian pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, koordinasi pekerjaan dan monitoring. Pada tahap pertama proses pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari beberapa tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembiayaan pendidikan di program satu keluarga satu sarjana, tahap kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diberikan tupoksi untuk menyusun pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana ini harus didasarkan pada kualifikasi pekerjaan asalnya, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan agar pengorganisasian atau tata kelola mampu dilaksanakan oleh BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang.

Tahap ketiga, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis sehingga tujuan dari program mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengkoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi. Tahap keempat, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas, tahapan pengorganisasian dalam pembiayaan pendidikan program satu keluarga satu sarja di BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka diperlukan peninjauan ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di program ini. Menurut pendapat peneliti, pelaksana program perlu memperhatikan skala prioritas sebagai indikator utama, jangan sampai kebutuhan ini tidak terorganisasikan dalam RKAT, sehingga tidak dapat dibiayai, maka diperlukan koordinasi dan pemilahan kebutuhan yang tepat. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa mengorganisasikan adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta fungsinya dalam organisasi (Saefullah, 2012).

Penempatan orang-orang yang yang berkompeten dibidangnya akan membantu efisiensi program pembiayaan yang pantas dijalankan dan memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa sebagai subjek pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum manajemen yang di kemukakan Henri Fayol yaitu asas pembagian kerja, asas wewenang dan tanggungjawab, asas disiplin, asas kesatuan perintah, asas kesatuan arah, asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, asas pemusatan wewenang, asas, hierarki, asas keteraturan, asas keadilan, dan asas inisiatif (Saefullah, 2012).

Dari hasil observasi, BAZNAS Kabupaten Kampar dapat melaksanakan kegiatan pengorganisasian dengan baik hal ini dapat dilihat dari pembagian tupoksi amil pelaksana program, alur pendistribusian program, tahapan seleksi program hingga SOP yang sudah dibakukan dalam bentuk rencana strategis BAZNAS Kabupaten Kampar, hal ini membuktikan apabila zakat benar-benar dikelola oleh amil ataupun lembaga resmi seperti BAZNAS/LAZNAS sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, Niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang (Khasanah, 2010). Dari data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pembiayaan pendidikan melalui *strukturisasi* dalam pengorganisasian yang tersusun rapi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana program serta mengacu pada besaran anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan atau *actuating* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.

Dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi tentang pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana sudah dilakukan tahapan manajerial yang baik hal ini bisa dilihat dari proses dan tahapan yang dilaksanakan semuanya sistematis dan telah sesuai prosedur yang telah disepakati mulai dari penandatanganan akad hingga pada saat prosesi wisuda sudah diakomodir pembiayaannya oleh pihak BAZNAS, tapi disini peneliti melihat BAZNAS Kabupaten Kampar masih terdapat sedikit kekurangan yakni tidak adanya pengalokasian pembiayaan tidak terduga, misalnya biaya rapat pertemuan, *upgrading* mahasiswa, ataupun biaya monitoring dan lainnya. Kejadian ini dapat memberikan pengajaran bahwa pengalokasian dana harus dikelola secara *komprensif* dan menyentuh segala elemen yang terlibat. Tetapi, pada praktiknya masih ada lembaga yang belum memiliki support *finansial* yang memadai, sehingga pengalokasian dana tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan komitmen untuk memenuhi di setiap pengalokasian di awal tahun. Meningkatkan kualitas pendidikan seyogyanya sejalan dengan peningkatan kualitas Sumber daya Manusia. Prioritas pengalokasian pembiayaan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan terutama dalam hal akses dan daya tampung serta kebutuhan lainnya (Ferdi, 2013).

Pada praktiknya, jumlah yang direalisasikan terkadang tidak sinkron dengan anggaran yang direncanakan. Penggunaan keuangan yang tidak sinkron dengan anggaran harus dicari tahu titik permasalahannya, bahkan bila apabila dapat dilakukan peninjauan anggaran agar fungsi realisasi anggaran dapat terkontrol. Perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya bisa terjadi karena: 1) adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran; 2) terjadinya penghematan atau pemborosan; 3) pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan; 4) adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi; dan 5) penyusunan anggaran yang kurang tepat. Anggaran bersifat luwes artinya apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan ternyata harus dilakukan penyesuaian kegiatan, maka anggaran dapat direvisi dengan menempuh prosedur tertentu (Abidin, 2017). Dari data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui tahapan yang sistematis dan telah sesuai prosedur yang disepakati mulai dari penandatanganan akad hingga pada saat prosesi wisuda sudah diakomodir pembiayaannya oleh pihak BAZNAS pembiayaan yang tidak tercantum dalam pelaksanaan dapat disikapi dengan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan anggaran.

Pengawasan atau *controlling* Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi serta observasi tentang pengawasan program beasiswa satu keluarga satu sarjana, diperoleh pengertian konsep bahwa *controlling* adalah proses pemeriksaan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan dengan mengukur, menilai, membandingkan, besarnya pengeluaran dengan penerimaan, yang dilakukan secara periodik oleh yang berwenang, agar program yang telah dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya dan kelak dapat diperbaiki. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik materiil, maupun spiritual untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan memberikan yang hak (Saefullah, 2013). Dari data observasi, menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar diketahui berjalan lancar, anggaran diperuntukkan sesuai perencanaan dimuat dalam laporan di setiap semesternya dimana didalamnya terdapat beberapa laporan seperti kartu hasil studi, laporan kegiatan mahasiswa serta bukti slip pembayaran SPP/UKT. Pelaporan disetiap pelaksanaan akan mempermudah proses pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan terutama *muzakki*, Implikasi strategi pembiayaan pendidikan berbasis filantropi diantaranya berimplikasi kepada, lembaga, masyarakat dan penerima manfaat itu sendiri. Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan, terutama untuk anak-anak sebagai bekal untuk mengantarkan kesuksesan mereka. Lembaga zakat hadir dalam rangka membantu mengembangkan program pendidikan supaya anak yang beralatar belakang ekonomi yang rendah memiliki akhlaq yang baik, intelektual yang tinggi, dan visi hidup yang mandiri agar kedepannya mereka mampu bersaing di era globalisasi ini (Siregar, 2020). Senada dengan hal di atas Nanang Fattah memperjelas bahwa pada dasarnya proses pengawasan terdiri dari tiga tahap, pertama menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana (Fattah, 2013). Dari data penelitian, data teori, dan pendapat peneliti tampak bahwa pengawasan/ *controlling* berfungsi untuk memonitoring seluruh aktifitas penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan.

Dari observasi peneliti terhadap data teori, peneliti melihat keberhasilan program pengawasan hanya memandang keberhasilan hanya dari sisi program jasmaniah, belum merambah rohaniyyah, oleh karenanya Pihak BAZNAS Kabupaten Kampar perlu menetapkan standar keberhasilan dengan faktor tersebut. Jadi keberhasilan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari efisiensi dan besarnya penyerapan anggaran yang disertai bukti keberhasilan siswa dalam akademik dan non akademik. Dari data lapangan, teori serta pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah sesuai dengan perencanaan dimana pelaporan dilakukan disetiap semester melalui bukti laporan berupa kartu hasil studi, laporan kegiatan mahasiswa dan bukti slip pembayaran SPP/UKT hal ini dilakukan agar semua kegiatan yang dilaksanakan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui metode analisis siklus kehidupan, mengingat sebelum melakukan kegiatan pendistribusian terlebih dahulu melihat jumlah dana zakat yang terhimpun sesuai dengan RKAT BAZNAS. Dengan menetapkan skala prioritas dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan mahasiswa sebagai penerima manfaat, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan. Kedua, pengorganisasian pembiayaan pendidikan melalui *strukturalisasi* dalam pengorganisasian yang tersusun rapi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana program serta mengacu pada besaran anggaran yang tersedia. Ketiga, pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui tahapan yang sistematis dan telah sesuai prosedur yang disepakati mulai dari penandatanganan akad hingga pada saat prosesi wisuda sudah diakomodir pembiayaannya oleh pihak BAZNAS, pembiayaan yang tidak tercantum dalam pelaksanaan dapat disikapi dengan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan anggaran. Keempat, pengawasan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah sesuai dengan perencanaan dimana pelaporan dilakukan disetiap semester melalui bukti laporan berupa kartu hasil studi, laporan kegiatan mahasiswa dan bukti slip pembayaran SPP/UKT hal ini dilakukan agar semua kegiatan yang dilaksanakan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrazaq. (2014). 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal', *Intizar* 20 (1): 165-66.
- Abidin, A, A. (2017). "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu", Surabaya : Jurnal Penjaminan Mutu - Volume 3.
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar).
- Sudibyo. (2018). Ketua BAZNAS RI, Wawancara, tanggal 20 mei 2018 di Jakarta, dikutip dari majalah Riau Berzakat.
- Rasyid, B. (2021). Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Wawancara tanggal 06 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.
- BPS Provinsi Riau tahun 2019
- Depdikbud. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Didin Hafidhuddin dkk. (2008). The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, (Malang : UIN Malang Pres, Cet. Pertama).
- Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- Edward Sallis. (2012). Manajemen Mutu Pendidikan ,Edisi ke-17, (Yogyakarta : JRCiSoD).
- Fadilah, A dkk. (2016). Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat di Bidang Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor, *Jurnal Syarikah* Vol. 2 No. 2 Desember 2016.
- Fattah, N. (2013). Landasan Manajemen Pendidikan, (PT Remaja RosdaKarya Bandung).
- Ferdi W. P. (2013). "Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis", *Kemendikbud : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* - Volume 19, Nomor 4. Desember.
- Dessler, G. (2006). Manajemen SDM ,Edisi ke-10, (Klaten: PT Indeks).
- Latief, H. (2013). "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam* 28 (1): 137, <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.
- Imam Machali dan Sauqi Futaqi. "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta", *Yogyakarta : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam - Volume 3, No 2, November 2018*.
- Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT, Ketua BAZNAS Kampar, Wawancara, tanggal 2 Februari 2021 di Bangkinang
- Mufron Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Aura Pustaka,Yogyakarta 2013).
- Muhammad Tho'in, Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat, *Jurnal Al-Anwal* Vol. 9 No. 2 Tahun 2017.
- Murtika Sari Siregar. "Strategi pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya", *UIN Maulana Malik Malang: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam- Volume 5, Nomor 1, Juni 2020*.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Zakat Instrumen Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : Puskas BAZNAS, 2017).
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Umat, (Malang, UIN-Maliki Press 2010).
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik Evaluasi Program Zakat Produktif 2018. (Jakarta : Puskas BAZNAS, 2019).
- Seafullah, Manajemen Pendidikan Islam, (CV Pustaka Setia Bandung:2012).
- Umi Zulfa, "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy" , *Jurnal Pendidikan Islam* 27 (2), (2016): 239, <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509>.
- Umratul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
- Usman, Husaini, Manajemen Teori Praktik, dan Riset Pendidikan, (Bumi Aksara Jakarta 2013).
- Veithzal Rivai dkk, Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 September, 2015.